

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Meskipun alternatif pekerjaan di Indonesia terbatas, masyarakat lebih memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena mencari pekerjaan di luar negeri lebih mudah dan lebih menjanjikan daripada di dalam negeri. Ada empat faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi, yaitu: (1) kondisi di daerah asal, (2) kondisi di daerah tujuan, (3) rintangan, dan (4) faktor individu. "Faktor-faktor yang ditemukan di daerah asal" mencakup hal-hal seperti upah yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, dan keadaan keuangan yang sulit.

Terlepas dari tingginya tingkat risiko dan tingginya prevalensi perdagangan orang dan eksploitasi, migrasi tenaga kerja tetap menjadi salah satu pilihan yang paling mudah diakses dan lazim untuk mendorong kemajuan sosial ekonomi keluarga dan Masyarakat di Nusa Tenggara timur selain menjadi petani. Mereka memutuskan untuk keluar negeri dan bekerja sebagai PMI, seperti halnya PMI di NTT, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri karena latar belakang pendidikan yang rendah, dan walaupun ada, gajinya tidak memadai. Berbeda dengan bekerja di luar negeri, pekerjaan dengan gaji yang layak bisa didapatkan dengan cepat. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk NTT juga berdampak pada tingkat pendidikan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Karena kerentanan ini, para pelaku perdagangan orang dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan menjadikan CPMI sebagai PMI ilegal atau non prosedural yang dapat disalahgunakan.

Pelaku perdagangan orang sering kali beroperasi secara terang-terangan, tetapi korbannya mungkin berbaur dengan masyarakat dan terlihat normal, sehingga sulit untuk mengenali kejahatan perdagangan manusia. Karena berbagai alasan, para korban jarang melaporkan kejahatan terhadap mereka, berbeda dengan jenis kejahatan lainnya. Pelaporan terhambat oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketakutan mereka terhadap pelaku

perdagangan orang, pengalaman mereka dengan kekerasan dan trauma, dan ketakutan mereka akan dipenjara atau dideportasi.

Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah telah berkolaborasi dengan IOM Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani migrasi. IOM melatih petugas imigrasi dan penegak hukum yang berada di garis depan dalam mencegah penyelundupan migran, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Pencegahan, penyelidikan, dan perlakuan manusiawi terhadap para migran sesuai dengan hak-hak mereka semua tercakup dalam program ini.

Program "3P" IOM yaitu Pencegahan, Penindakan, dan Perlindungan, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia. Program pendidikan strategis bernama "Aku Tahu" juga dilakukan oleh IOM antara tahun 2009 dan 2014. Selain itu, terdapat juga Program PIJAR yang merupakan hasil kolaborasi antara IOM, Semut Nusantara, dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk membantu PMI yang kembali ke negara asalnya karena terkena dampak COVID-19.

Pemerintah juga telah menyetujui 18 MoU terkait ketenagakerjaan dengan berbagai negara, yang merangkum sektor formal dan informal. Sistem satu saluran dan langkah-langkah lain untuk merampingkan dan mengatur proses perekrutan, seperti yang dilakukan dengan Malaysia dan Arab Saudi, tercermin dalam Nota Kesepahaman ini.

Terdapat juga peran dari pemerintah daerah, bantuan dari Masyarakat setempat untuk menyadarkan bahayanya bermigrasi secara ilegal. Selain itu, gereja memimpin dan secara agresif berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan pembekalan kepada para calon migran untuk mencegah mereka meninggalkan negara ini tanpa mengikuti prosedur yang benar.

Tidak hanya itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus memperluas, memodifikasi, dan menyediakan program orientasi pra-

keberangkatan ke wilayah NTT untuk memfasilitasi pengarusutamaan gender dan memberdayakan perempuan migran, menyediakan program orientasi pra-keberangkatan ke wilayah NTT dalam upaya memberdayakan pekerja migran perempuan dan memajukan pengarusutamaan gender.

Untuk memberdayakan anggota masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan merespons kasus-kasus pelecehan dan eksploitasi, lembaga pemerintah daerah harus bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mendukung inisiatif penjangkauan masyarakat. Inisiatif ini harus berpusat pada penyediaan informasi dasar tentang pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Organisasi pemerintah dan media harus mencari cara untuk mengkomunikasikan kisah-kisah yang lebih "nyata" tentang migrasi di radio, TV, dan platform lain yang mensponsori pembuatan film dokumenter, acara televisi, dan komposisi musik tentang topik tersebut.